

SINKRONISASI PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI PANGAN PUSAT DAN DAERAH

Eka Chandra Buana

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik/
Plt. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Surabaya, 14 September 2022



DASAR HUKUM TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI ANGGOTA TPIN

UU NO.25/2004 SPPN

PP No. 40/2006
Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan
nasional

PP NO. 17/2017
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
Tahunan

PERENCANAAN JANGKA PANJANG

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

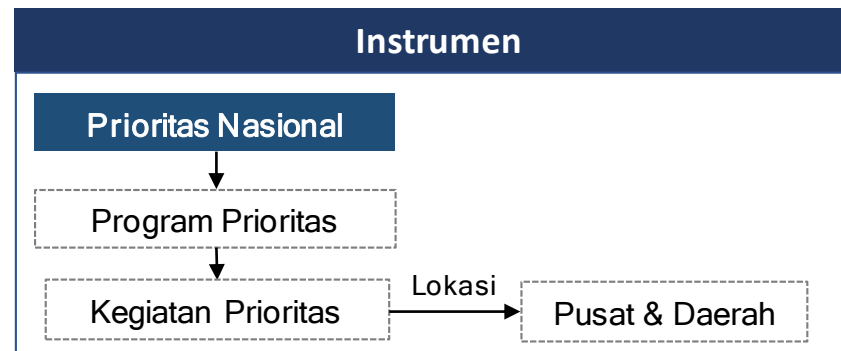
PERENCANAAN TAHUNAN

Permen PPN/Kepala Bappenas No.6 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Menyusun Perencanaan Kebijakan
Pengendalian Inflasi untuk Jangka Pendek
(RKP) dan Jangka Menengah (RPJMN)

Melalui Pengendalian 4K:

- Ketersediaan Pasokan
- Keterjangkauan Harga
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi efektif



Kepres No.23/2017
Tim Pengendalian Inflasi Nasional

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk:

- 1 Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi
- 2 Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi
- 3 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No. 3
/Juklak/Sesmen/03/2021 tentang
Penandaan (*Tagging*) Kebijakan
Pengendalian Inflasi.

Tagging RO yang mendukung
Pengendalian Inflasi dalam aplikasi
KRISNA

PENGENDALIAN INFLASI DALAM RPJMN 2020-2024

Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi



Meningkatkan **ketersediaan** komoditas pangan strategis



Meningkatkan **kerjasama** antardaerah



Meningkatkan kualitas **data/statistik**



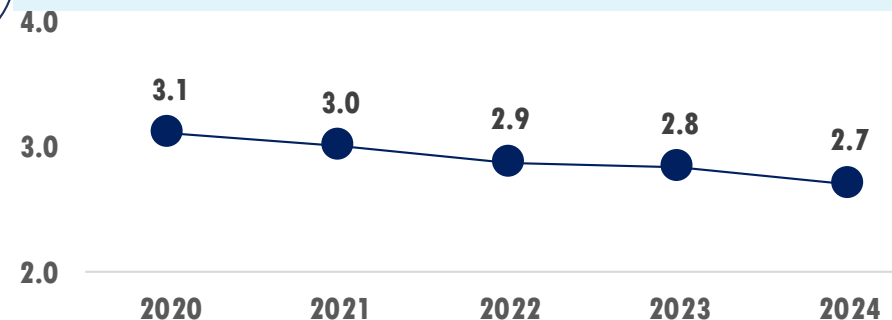
Memperkuat tata kelola sistem **logistik** nasional dan **konektivitas** antarwilayah



Menjangkar **ekspektasi inflasi** dalam sasaran yang ditetapkan

- Laju inflasi yang **rendah** dan **stabil** diharapkan dapat menjaga **daya beli** dan mendorong **konsumsi masyarakat** sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang **berkualitas**.
- Tingkat inflasi ditargetkan **stabil** dengan tren **menurun** menjadi sekitar **2,7%** pada tahun **2024**, dan **3,1%** untuk inflasi pangan bergejolak

Target Inflasi dalam RPJMN 2020-2024 (%)



Target Inflasi Pangan Bergejolak* (%)

Baseline 2019

4,3%

Target 2024

3,1%

*Target inflasi Pangan Bergejolak merupakan IKU yang diampu Kementerian Perdagangan TA 2022, dalam masa transisi penagalihan kepada Badan Pangan Nasional untuk TA 2023

Pengendalian Inflasi dalam Agenda Pembangunan 2020-2024

Agenda Pembangunan

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Sasaran

Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

Arah Kebijakan

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Indikator

(8) Tingkat Inflasi (%)
(9) Inflasi pangan bergejolak (%)

Tema 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

SASARAN INFLASI



2,00-4,00%

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAN RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas pangan strategis

Pembangunan lumbung pangan masyarakat



K/L: Kementerian Pertanian

2. Efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional untuk mengurangi kesenjangan harga

Pengembangan *National Logistic Ecosystem*



K/L: Kementerian Keuangan

Pembangunan/Revitalisasi Gudang SRG/Non SRG



Lokasi: Kab. Belu, Kota Jayapura, Kota Palu

K/L: Kementerian Perdagangan

3. Optimalisasi pasokan pangan : pembangunan *food estate*

Optimasi Lahan



Lokasi: 34 Provinsi

K/L: Kementerian Pertanian

Penyediaan sarana pasca panen tanaman pangan mendukung *food estate*



K/L: Kementerian Pertanian

Areal Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mendukung *food estate*




Lokasi: Pusat, Sumatera Utara

K/L: Kementerian Pertanian


4. Perkuat skema kemitraan petani dan nelayan dengan pelaku usaha ritel modern

Korporatisasi Petani dan Nelayan melalui Koperasi

 Lokasi: 11 Provinsi
K/L: Kementerian KUKM

5. Mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung pertanian dan pengendalian banjir

Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan


 Lokasi: Pusat, Kab. Merauke, Kab. Manokwari, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama
K/L: Kementerian Pertanian

Penyediaan alat dan mesin pertanian mendukung *food estate*

 K/L: Kementerian Pertanian


6. Meningkatkan akurasi serta kredibilitas data pangan dan pertanian

Penyediaan Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan


 K/L: Kementerian Pertanian

7. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi dalam pasokan, distribusi, dan komunikasi kebijakan inflasi

Pengembangan Model Pertanian Modern

 Lokasi: Karawang
K/L: Kementerian Pertanian

Teknologi Mekanisasi Pertanian

 Lokasi: Tangerang, Banten
K/L: Kementerian Pertanian

Tema 2023: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

SASARAN INFLASI >> 2,00-4,00%

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAN RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG

1. Kestabilan Harga : stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan

Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo



Lokasi: Provinsi Papua, Kabupaten Mimika
K/L: Kementerian Perhubungan



Koordinasi intervensi stabilisasi harga bapok menjelang HBKN

K/L: Kementerian Perdagangan

2. Ketersediaan pasokan : produksi pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan penguatan kelembagaan

Pengembangan *Food Estate*



Lokasi Prioritas FE: Inti (5 Prov, 7 Kab/Kota),
Penyangga (1 Prov, 41 Kab/Kota)
K/L: Kementerian Pertanian



Penguatan KSPP / Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)

Lokasi Prioritas KSPP: 32 Prov, 100 Kab/Kota
K/L: Kementerian Pertanian

3. Kelancaran Distribusi : penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan infrastruktur perdagangan

Mendukung Konektivitas Daerah



Lokasi: Provinsi Papua, Kabupaten Mimika
K/L: Kementerian Perhubungan



Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non SRG

K/L: Kementerian Perdagangan

4. Komunikasi Efektif : perbaikan kualitas data, koordinasi pusat-daerah, dan pengelolaan ekspektasi.



Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pangan

Lokasi: Pusat
K/L: Kementerian Pertanian



Penyediaan Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Lokasi Prioritas KSPP: 32 Prov, 100 Kab/Kota
K/L: Kementerian Perdagangan



MP Transformasi Digital

Penanggung Jawab Proyek: Kemenkominfo Lintas K/L/D:

- ANRI
- BIN
- BRIN
- BSSN
- Kemenag
- Kemendagri
- Kemen Desa PDTT
- Kemen KP
- Kemenkes
- Kemnaker
- Kemenkeu
- Kemen KUKM
- Kemenparekraf
- Kemen PANRB
- Kemdikbud Ristek
- Kemendag
- Kemenperin
- Kemenhan
- Kemensos
- Polri
- Perpusnas RI
- TVRI



Daftar RO dan Lokasi, a.l

Pengembangan *National Logistic Ecosystem*



K/L: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Industri Sektor Pemesinan dan Alat Mesin Pertanian yang terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan



K/L: Kementerian Perindustrian

Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian



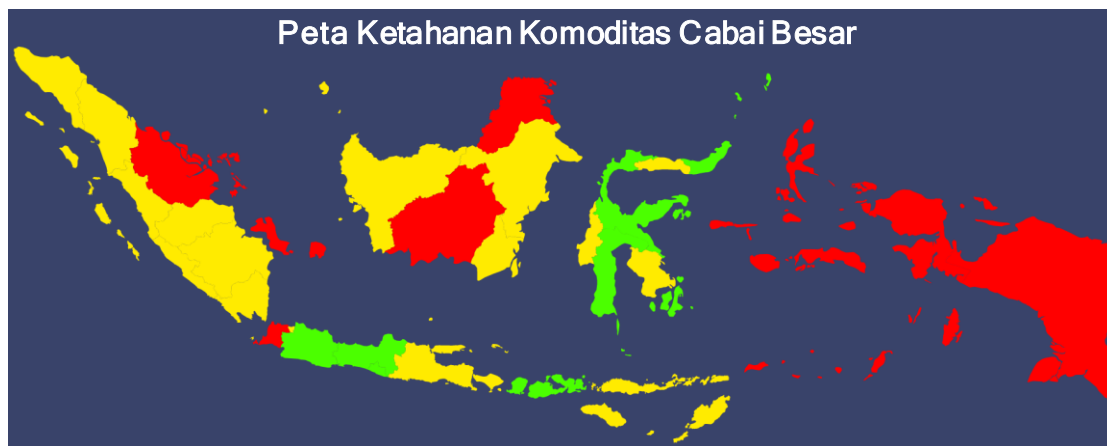
K/L: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Yang Mendapat Fasilitas



K/L: Kementerian Perindustrian

SEBARAN KETAHANAN KOMODITAS PANGAN MINGGU KE 1 SEPTEMBER 2022



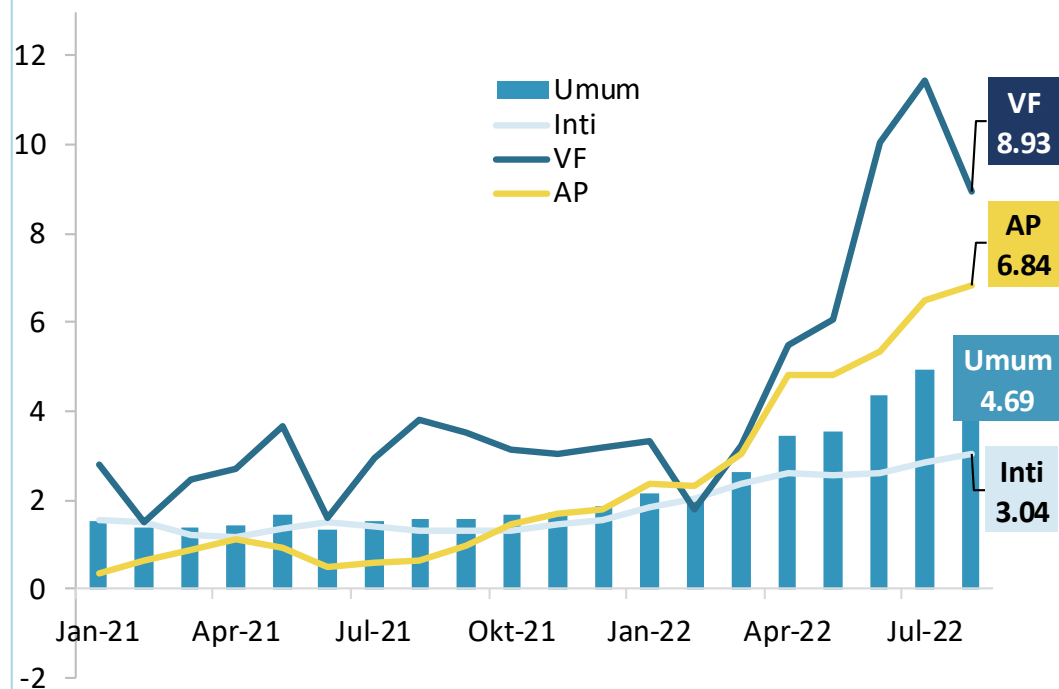
■ ketahanan \geq 2 hari ■ ketahanan 1 - 2 hari ■ ketahanan \leq 1 hari

Sumber : Badan Pangan Nasional

Berdasarkan peta ketahanan pangan sejumlah komoditas diatas, perlu dilakukan intervensi melalui pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Antarwilayah terutama antar daerah yang memiliki ketahanan pangan pokok dengan daerah yang masih memiliki permintaan tinggi terhadap komoditas pokok tersebut namun belum mencukupi.

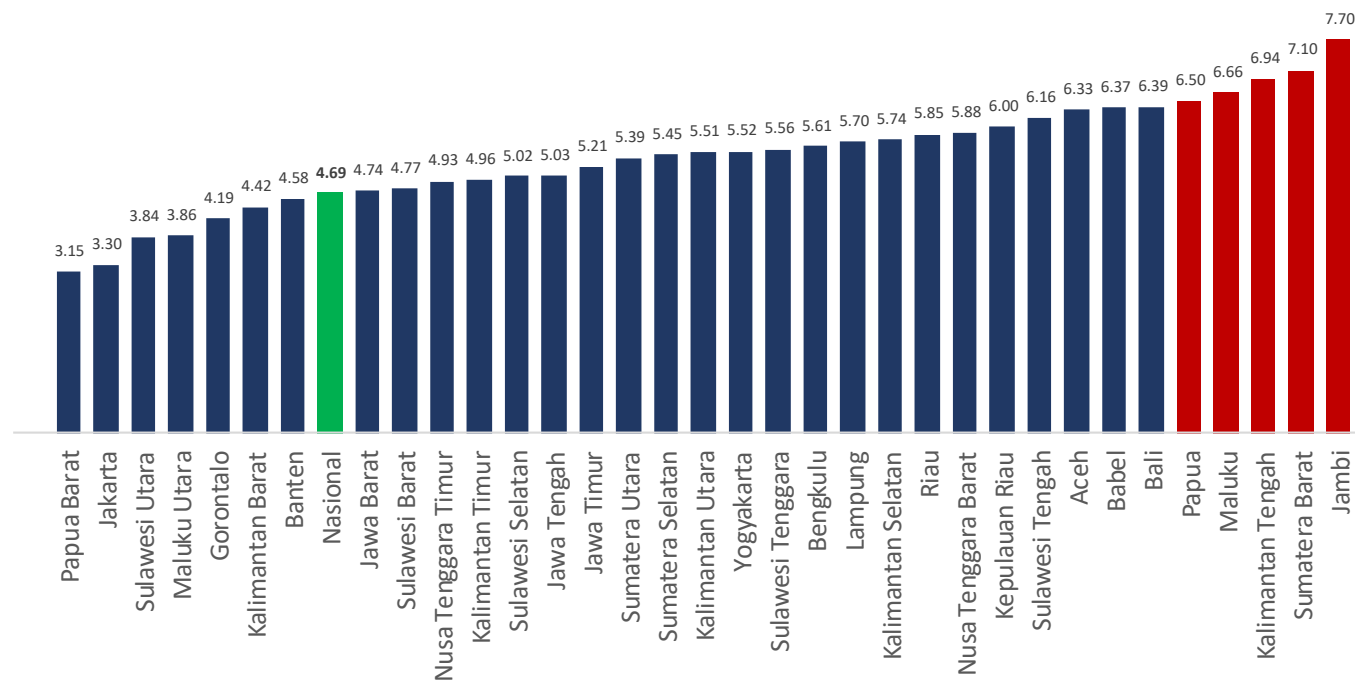
GAMBARAN INFLASI DOMESTIK, AGUSTUS 2022

Inflasi Nasional Berdasarkan Komponen, persen (yoy)



Sumber: BPS (diolah, 2022)

Inflasi Provinsi Agustus, persen (yoy)



- Inflasi nasional pada Agustus 2022
 - Deflasi 0,21 % (mtm) atau 4,69% (yoy) turun dibandingkan Juli sebesar 4,94% (yoy).
 - Penurunan dipengaruhi oleh inflasi *volatile food* (VF) yang melandai ditengah kenaikan inflasi *administered prices* (AP) dan Inti.
- Secara spasial, terdapat 27 Provinsi dengan realisasi inflasi lebih tinggi dari nasional, 5 Provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu **Jambi, Sumbar, Kalteng, Maluku dan Papua**. Mengendalikan inflasi pangan di darah merupakan kunci untuk stabilitas inflasi nasional.

ARAHAN PRESIDEN DALAM RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2022 TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail



1

Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi



2

Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat;



3

4



Mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

5



Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah



HIGHLIGHT ARAHAN PRESIDEN No 4 : PENYERAPAN BELANJA APBD DAN PENYALURAN DAK DI DAERAH PER 31 AGUSTUS 2022 MASIH RENDAH

Belanja APBD terealisasi sebesar 48,1 persen pagu

Provinsi	Pagu Belanja APBD (Rp. T)	Realisasi Belanja APBD (Rp.T)	% Penyerapan
1 Aceh	44,8	24,7	55,2%
2 Sumut	59,5	26,6	44,6%
3 Sumbar	27,6	14,3	51,7%
4 Riau	32,3	13,8	42,6%
5 Jambi	18,8	7,9	41,9%
6 Sumsel	39,7	17,9	45,1%
7 Bengkulu	12,0	6,9	58,0%
8 Lampung	30,5	14,6	48,0%
9 Babel	9,1	4,2	46,6%
10 Kepri	13,4	6,6	49,3%
11 DKI	76,8	28,9	37,7%
12 Jabar	125,6	59,0	47,0%
13 Jateng	108,4	57,9	53,4%
14 DIY	16,1	9,5	59,1%
15 Jatim	132,9	67,5	50,8%
16 Banten	38,0	28,6	75,2%
17 Bali	23,2	13,1	56,5%
18 NTB	22,3	9,5	42,7%
19 NTT	29,9	10,7	35,8%
20 Kalbar	25,4	12,3	48,5%
21 Kalteng	22,4	10,6	47,3%
22 Kalsel	25,5	12,8	50,0%
23 Kaltim	35,9	15,1	42,0%
24 Kaltara	8,1	4,3	53,1%
25 Sulut	17,3	8,5	48,9%
26 Sulteng	21,0	10,7	50,8%
27 Sulsel	44,9	22,8	50,7%
28 Sultra	22,5	7,8	34,5%
29 Gorontalo	8,1	4,7	57,8%
30 Sulbar	8,0	3,7	46,1%
31 Maluku	14,4	4,1	28,2%
32 Maluku Utara	14,1	6,3	44,4%
33 Papua Barat	22,2	8,8	39,6%
34 Papua	50,1	23,4	46,6%
Indonesia	1.200,9	577,9	48,1%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) masih besar, yaitu Rp64,4 Triliun untuk seluruh Pemerintah Daerah

Provinsi	Realisasi Surplus/Defisit	Realisasi Pembiayaan Daerah	Realisasi SILPA
1 Aceh	-1,9	0,6	-1,3
2 Sumut	2,4	3,0	5,4
3 Sumbar	0,7	1,3	2,0
4 Riau	0,2	1,9	2,1
5 Jambi	0,4	0,3	0,7
6 Sumsel	1,1	1,3	2,4
7 Bengkulu	-0,2	0,2	0,1
8 Lampung	1,5	0,6	2,1
9 Babel	0,5	0,8	1,3
10 Kepri	-0,4	0,3	-0,1
11 DKI	1,1	0,6	1,7
12 Jabar	0,1	4,7	4,8
13 Jateng	-5,9	5,7	-0,2
14 DIY	0,1	0,3	0,4
15 Jatim	4,1	17,0	21,2
16 Banten	-0,5	2,6	2,1
17 Bali	-0,2	1,4	1,2
18 NTB	0,5	0,5	1,0
19 NTT	1,7	0,3	2,0
20 Kalbar	0,9	0,5	1,4
21 Kalteng	0,3	0,9	1,2
22 Kalsel	0,0	0,5	0,5
23 Kaltim	2,4	2,8	5,2
24 Kaltara	0,0	0,8	0,8
25 Sulut	-0,7	0,2	-0,6
26 Sulteng	-0,6	1,3	0,7
27 Sulsel	-0,4	3,3	2,9
28 Sultra	1,4	0,1	1,5
29 Gorontalo	-0,5	0,5	0,0
30 Sulbar	0,0	0,2	0,2
31 Maluku	0,1	0,1	0,1
32 Maluku Utara	-0,5	0,1	-0,4
33 Papua Barat	0,9	-0,4	0,5
34 Papua	0,3	1,0	1,3
Indonesia	9,0	55,5	64,4

DAK terealisasi sebesar Rp94,1 Triliun atau 49,7 persen pagu

Provinsi	Pagu DAK (Rp.T)	Realisasi DAK (Rp.T)	% Penyerapan DAK
1 Aceh	5,4	2,7	50,6%
2 Sumut	10,8	5,4	50,4%
3 Sumbar	5,6	2,7	47,7%
4 Riau	4,6	2,4	51,1%
5 Jambi	3,0	1,4	47,0%
6 Sumsel	6,1	3,1	51,1%
7 Bengkulu	2,3	1,1	48,8%
8 Lampung	6,0	3,0	50,1%
9 Babel	1,5	0,7	43,2%
10 Kepri	1,7	0,9	50,1%
11 DKI	3,3	1,8	56,6%
12 Jabar	22,1	12,6	57,0%
13 Jateng	18,8	10,0	53,3%
14 DIY	2,6	1,3	50,0%
15 Jatim	19,9	10,5	52,5%
16 Banten	5,1	2,9	56,4%
17 Bali	3,2	1,6	50,9%
18 NTB	4,9	2,5	50,1%
19 NTT	7,2	3,1	42,6%
20 Kalbar	4,7	2,3	49,1%
21 Kalteng	3,5	1,7	47,9%
22 Kalsel	3,6	1,7	47,8%
23 Kaltim	3,1	1,4	46,0%
24 Kaltara	1,0	0,4	41,4%
25 Sulut	3,5	1,4	39,9%
26 Sulteng	3,9	1,7	43,2%
27 Sulsel	9,0	4,2	46,8%
28 Sultra	3,9	1,8	46,5%
29 Gorontalo	1,6	0,7	46,0%
30 Sulbar	1,8	0,9	46,3%
31 Maluku	3,2	1,4	43,6%
32 Maluku Utara	2,8	1,3	47,5%
33 Papua Barat	3,0	1,1	37,3%
34 Papua	6,7	2,5	37,8%
Indonesia	189,1	94,1	49,7%

Penyerapan Belanja APBD serta penyaluran DAK di daerah perlu terus ditingkatkan dan dimanfaatkan

Sumber: Portal DJPK, Kemenkeu, diolah

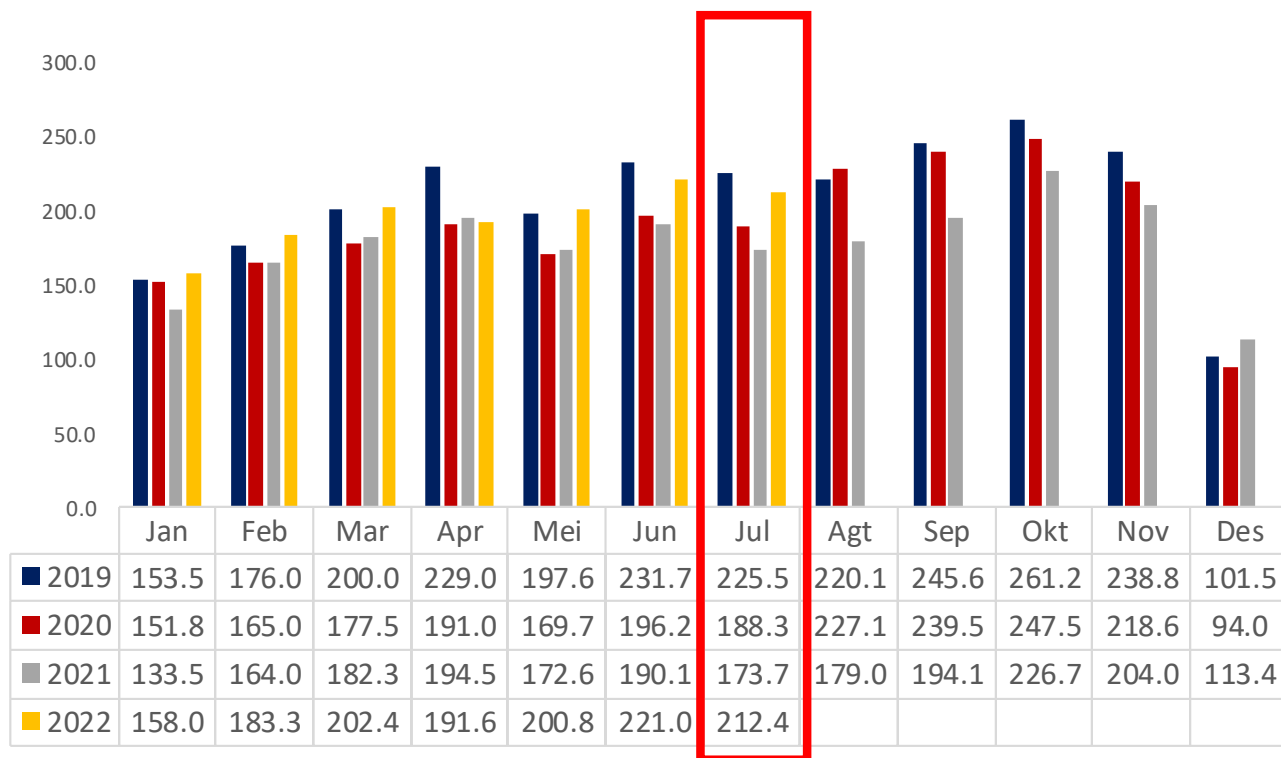
untuk mendukung pengendalian inflasi pangan di daerah.

HIGHLIGHT ARAHAN PRESIDEN No 3 : DANA PEMDA DI PERBANKAN MASIH TINGGI

Posisi dana Pemda di perbankan per Juli 2022 sebesar Rp212,4 T, relatif lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di 2021

- Belum optimalnya realisasi belanja daerah utamanya disebabkan a.l. penurunan belanja honorarium, belanja hibah, bantuan sosial, serta belanja kesehatan terkait COVID-19
- Selain itu, tingginya SILPA utamanya karena aktivitas belanja daerah yang masih rendah.

Dana Pemda di Bank Tahun 2019-2022 Hingga Juli 2022 (Rp Triliun)



Sumber: Kemenkeu dalam Press Conference APBN KITA, per Juli 2022

Realisasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Hingga 31 Agustus 2022 (Rp Triliun)

No	Provinsi	Rp Triliun	No	Provinsi	Rp Triliun
1	Jatim	21,2	18	Kalteng	1,2
2	Sumut	5,4	19	NTB	1,0
3	Kaltim	5,2	20	Kaltara	0,8
4	Jabar	4,8	21	Sulteng	0,7
5	Sulsel	2,9	22	Jambi	0,7
6	Sumsel	2,4	23	Papua Barat	0,5
7	Banten	2,1	24	Kalsel	0,5
8	Riau	2,1	25	DIY	0,4
9	Lampung	2,1	26	Sulbar	0,2
10	Sumbar	2,0	27	Maluku	0,1
11	NTT	2,0	28	Bengkulu	0,1
12	DKI	1,7	29	Gorontalo	0,0
13	Sultra	1,5	30	Kepri	-0,1
14	Kalbar	1,4	31	Jateng	-0,2
15	Babel	1,3	32	Maluku Utara	-0,4
16	Papua	1,3	33	Sulut	-0,6
17	Bali	1,2	34	Aceh	-1,3
18	Kalteng	1,2		Indonesia	64,4

Sumber: Portal DJPK, Kemenkeu, diolah

PENUTUP : *EXTRA EFFORT* PERLU DILAKUKAN DAERAH UNTUK MENJAGA STABILITAS INFLASI PANGAN



- 1** Percepatan Belanja APBD sehingga tidak mengendap di perbankan, utamanya diarahkan kepada subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi, bantuan sosial tepat sasaran, dan operasi pasar sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga BBM yang baru diputuskan Pemerintah Pusat
- 2** Akselerasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk daerah surplus dengan daerah defisit dalam menjaga ketersediaan *supply* komoditas
- 3** Penguatan digitalisasi daerah dalam mendukung sarana-prasarana untuk mengolah produk hasil pertanian dan mendukung kelancaran distribusi



VISI
INDONESIA
2045




Terima Kasih

HIGHLIGHT DUKUNGAN DAK RKP TAHUN 2023 YANG MENDUKUNG PENGENDALIAN INFLASI (1)

DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional, Major Project dan isu prioritas lainnya (antara lain pemenuhan Mandatory Spending, Ketahanan Pangan (FE & KSPP))

PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

 **Tematik Pengembangan Food Estate**
Lokpri FE: Inti (5 Prov, 7 Kab/Kota),
Penyangga (1 Prov, 41 Kab/Kota)

Rp. 2.121,8 M

Tema/Bidang	Rp. M
Pertanian	650,0
Irigasi	339,8
Jalan	1.100,0
Kehutanan	32,0

(Rp M)

Tematik Penguatan KSPP / Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)


Lokpri KSPP: **32 Prov, 100 Kab/Kota**



Rp. 6.045,1 M

Tema/Bidang	Rp. M
Pertanian	1.650,0
Irigasi	1.260,2
Kelautan dan Perikanan	1.234,9
Jalan	1.900,0

(Rp M)

 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 300,0

Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi

Lokpri: 16 Prov, 84 Kab/Kota **Rp2.648,0 M**

Bidang	Rp. M
Transportasi Perdesaan	750,0
Transportasi Perairan	440,0
Jalan	1.370,0
Infrastruktur Energi Terbarukan (IET)	88,0

*Catatan:
Belum termasuk rencana InPres Jalan Daerah*



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

DAK FISIK

Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu



Lokpri : 29 Kab/Kota

Rp. 608,3 M

Bidang	Rp. M
Air Minum	105,0
Sanitasi	75,0
Perumahan dan Permukiman	428,3

Mendukung Konektivitas Daerah



Lokpri : 15 Provinsi dan 286 Kab/Kota

Rp. 5.232,6 M

Bidang	Rp. M
Jalan	5.232,6

*) DAK Non Fisik BLPS mendukung PN 6 menunggu konfirmasi kebijakan pemanfaatan, perhitungan teknis dan kesiapan pelaksanaan.